

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

RIVA ADILA
1902110123



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 13 September 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RIVA ADILA
NPM : 1902110123

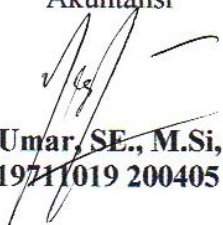
Dengan judul:

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH)

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

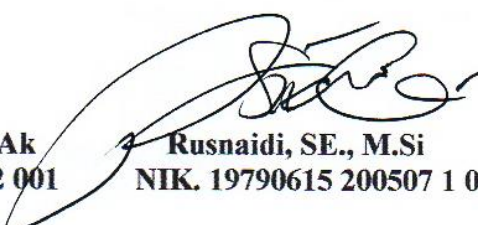
Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE., M.Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Syamsidar, SE., M.Si., Ak
NIK. 19730921 199901 2 001

Pembimbing II


Rusnaldi, SE., M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001



Mengetahui,
Dekan,


Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si. MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 13 September 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RIVA ADILA
NPM : 1902110123

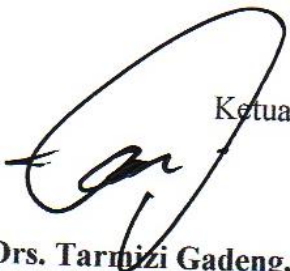
Dengan judul:

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH)**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 28 Agustus 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si. MM

Sekretaris


Syamsidar, SE., M.Si., Ak

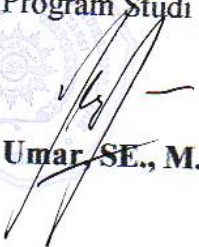
Anggota


Rusnaldi, SE., M.Si

Anggota


Elviza, SE., M.Si

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


Zulkifli Umar, SE., M.Si, Ak. CA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 13 September 2022
Yang Menyatakan

 
RIVA ADILA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RIVA ADILA**
NPM : 1902110123
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

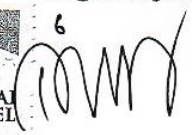
PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 13 September 2022

Banda Aceh, 13 September 2022
Yang Menyatakan,



RIVA ADILA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah, ketabahan, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh”**. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

1. Terimakasih kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan restunya
2. **Terimakasih kepada Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, Ak** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Banda Aceh,
3. **Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA** selaku Ketua jurusan program studi Akuntansi Fakultas Muhammadiyah Aceh.
4. **Ibu Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA** selaku pembimbing I Penulis yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. **Bapak Rusnaidi, SE. M.Si,** selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini

6. Terimakasih pula kepada teman-teman Angkatan 2019 yang telah banyak memberikan dorongan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya

Banda Aceh, Agustus 2022

RIVA ADILA

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Skop Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
2.1 Landasan Teoritis	8
2.1.1 Pengelolaan Dana Desa	8
2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa	8
2.1.1.2 Manfaat Pengelolaan Dana Desa	9
2.1.1.3 Faktor-faktor Pengelolaan dana desa	10
2.1.1.4 Indikator Pengelolaan dana desa	10
2.1.2 Transparansi	11
2.1.2.1 Pengertian Transparansi	11
2.1.2.2 Manfaat Transparansi	12
2.1.2.3 Ruang lingkup Transparansi	12
2.1.2.4 Indikator Transparansi	13
2.1.3 Akuntabilitas	14
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas	14
2.1.3.2 Manfaat Akuntabilitas	15
2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas	15
2.1.4 Partisipasi masyarakat	16
2.1.4.1 Pengertian Partisipasi masyarakat	16
2.1.4.2 Tujuan Partisipasi masyarakat	16
2.1.4.3 Indikator Partisipasi masyarakat	17
2.2 Penelitian Sebelumnya	18
2.3 Kerangka Pemikiran	20
2.3.1 Hubungan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa	20
.....	22
2.3.2 Hubungan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa	21
.....	23

2.3.3	Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa	21
2.4	Hipotesis penelitian	22
BAB III	METODELOGI PENELITIAN	24
3.1	Desain Penelitian	24
3.1.1	Tujuan Studi	24
3.1.2	Jenis Investigasi	24
3.1.3	Horizon Waktu	24
3.1.4	Unit Analisis	25
3.2	Populasi dan Sampel	25
		22
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	26
3.4	Skala Pengukuran	26
3.5	Definisi dan Operasional variabel	27
3.6	Teknik Analisa Data	29
3.6.1	Pengujian Validitas	30
3.6.2	Pengujian Reliabilitas	30
3.6.3	Pengujian Asumsi Klasik	31
3.7	Pengujian Hipotesis	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1	Hasil Penelitian	34
4.1.1	Gambaran Umum Kecamatan Lueng Bata	34
4.1.2	Karakteristik Responden	35
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	37
4.2.1	Transparansi	37
4.2.2	Akuntabilitas	39
4.2.3	Partisipasi Masyarakat	40
4.2.4	Pengelolaan Dana Desa	41
4.3	Hasil Pengujian Data	42
4.3.1	Pengujian Instrumen	42
4.3.2	Pengujian Asumsi Klasik	45
4.4	Regresi Linier Berganda	47
4.5	Koefesien Determinasi	48
4.6	Hasil Pengujian Hipotesis	48
4.7	Pembahasan	49
4.7.1	Pembahasan Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat Terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	49
4.7.2	Pembahasan Transparansi terhadap Pengelolaan dana desa Pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata	50
4.7.3	Pembahasan Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Serapan Anggaran Pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata	51
4.7.4	Pembahasan Pengaruh Partisipasi masyarakat Terhadap	

	Serapan Anggaran Pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata	52
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
	5.1 Kesimpulan.....	54
	5.2 Saran	54
DAFTAR		
PUSTAKA.....		55
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Populasi Penelitian	25
Tabel 3.2 Skala Pengukuran	27
Tabel 3.3 Definisi dan Operasional Variabel.....	27
Tabel 4.1 Karakteristi Responden.....	36
Tabel 4.2 Transparansi.....	38
Tabel 4.3 Akuntabilitas	39
Tabel 4.4 Partisipasi Masyarakat	40
Tabel 4.5 Pengelolaan Dana Desa	41
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas	43
Tabel 4.7 Hasil Pengujian reliabilitas	44
Tabel 4.8 Coefficients	47
Tabel 4.9 Model Summary	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 4.1 P.Plot	45
Gambar 4.2 Heterokedastisitas	46

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH)**

RIVA ADILA
1902110123

Pembimbing 1) : Syamsidar, SE, M.Si. Ak

Pembimbing 2) : Rusnaidi, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah seluruh Desa yang ada di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sebanyak 9 Desa, dengan jumlah 36 sampel yaitu Kepala Desa, Sekretaris Bendahara Desa serta Tuha Peut Gampong. Data dikumpulkan melalui data kuesioner, menggunakan skala likert, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, pengujian hipotesis dengan uji koefisien. Nilai konstanta sebesar 3,314 dapat diartikan bahwa tanpa adanya transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa telah ada nilai sebesar 3.314. Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,552 artinya sebesar 55,2 % perubahan-perubahan dalam variabel terikat (partisipasi masyarakat) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

Kata Kunci : *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Dana Desa*

*THE EFFECT OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND COMMUNITY
PARTICIPATION ON VILLAGE FUND MANAGEMENT
(STUDY IN LUENG BATA DISTRICT, BANDA ACEH CITY)*

RIVA ADILA
190110123

Supervisor 1) : Syamsidar, SE, M.Sc. Ak
Advisor 2) : Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether transparency, accountability and community participation affect the management of village funds in Lueng Bata District, Banda Aceh City. The population of this research is all villages in Lueng Bata Subdistrict, Banda Aceh City as many as 9 villages, with a total of 36 samples, namely the Village Head, Village Treasurer Secretary and Tuha Peut Gampong. Data were collected through questionnaire data, using a Likert scale, and the data analysis technique used in this study was multiple linear regression, hypothesis testing with coefficient test. The constant value of 3,314 can be interpreted that without transparency, accountability and community participation, the management of village funds has a value of 3,314. The coefficient of determination (R^2) is 0.552, meaning that 55.2% changes in the dependent variable (public participation) can be explained by changes in influencing factors such as transparency, accountability and community participation. The results of the study indicate that transparency, accountability and community participation together affect the management of village funds in Lueng Bata District, Banda Aceh City.

Keywords: Transparency, Accountability, Community Participation and Village Fund Management

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016:201). Desa mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mulai memperhatikan pembangunan bangsa Indonesia ini. Hal tersebut berupa peningkatan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut diadakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Wijaya, 2018:93).

Sejak awal dialokasikannya dana desa, anggaran untuk dana desa tersebut selalu mengalami kenaikan. Dari hasil survey awal yang di dapat dari masyarakat setempat, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, salah satu desa yang mendapat anggaran dana desa oleh pemerintah. Pada tahun 2019, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh mendapat anggaran dana desa sebesar Rp.260.358.000,-. Di tahun 2020, mengalami kenaikan menjadi Rp.713.685.000. dengan adanya kenaikan alokasi dari dana desa tersebut, tentunya membawa pengaruh positif terhadap desa. Dana desa di perioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, hal ini bisa saja terjadi akibat tidak ada pengelola dana desa yang baik.

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Egi, 2019:2). Pelaporan dalam pengelolaan dana desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati atau Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Wali kota, menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota, dan menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Ada beberapa

faktor dalam mempengaruhi pengelolaan dana desa diantaranya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (Indonews. 2020).

Transparansi (*Transparency*) adalah dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, terjadi adanya partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat (Mardiasmo, 2011:113). Transparansi memiliki karakteristik yang harus diperhatikan yaitu, informatif yang merupakan pemberian arus informasi, berita, penjelasan, mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi yang jelas dan akurat, *openness* atau keterbukaan artinya keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dan pengungkapan *disclouser* merupakan pengungkapan kepada masyarakat atau publik *stakeholders* atas aktivitas dan kinerja finansial.

Selain transparansi, akuntabilitas juga mempengaruhi pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Muindro, 2013:14).

Akuntabilitas yang harus digunakan oleh organisasi sektor publik ada beberapa aspek yaitu: pertama, Akuntabilitas hukum dan kejujuran yaitu akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan

mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, akuntabilitas manajemen yang merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Ketiga, Akuntabilitas program lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Akuntabilitas publik berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan bermanfaat untuk rakyat bukan sekedar program untuk menghabiskan anggaran yang tidak jelas tujuannya. Ke empat, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang diakibatkan. Ke lima, akuntabilitas finansial yaitu pertanggungjawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi (Mahmudi, 2016:19).

Partisipasi masyarakat juga ikut mempengaruhi pengelolaan dana desa, *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara, serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2011:32).

Tahap pelaksanaan program partisipasi seperti pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama, Pelaksanaan yaitu pergerakan sumberdaya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan

program yang dilaksanakan, Pengambilan manfaat yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai, dan Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan (Solekhan, 2014: 10).

Kecamatan Lueng Bata menerima anggaran dana desa sebesar Rp.3.811.211.336,00. Fenomena yang terjadi pada tahun 2020, ada tiga gampong diwilayah kecamatan Lueng Bata yang progress penginputan dokumen dana desa rendah. Tiga gampong itu adalah Gampong Lamseupeung, lampaloh dan Lueng Bata. Di penghujung tahun 2021, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Aceh, ada tiga orang perangkat desa dari gampong Lueng Bata terbukti menggelapkan dana desa sebesar Rp.110.000.000,- uang tersebut digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadi. Perbuatan mereka melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-undang tindak pidana. Dana desa menjadi suatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada daerah kecil dan pelosok, menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya (Merdeka.com,2021).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sutrawati (2016) dengan hasil penelitian bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Redi (2019) dan fitri (2019) juga melakukan penelitian yang serupa dengan hasil transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi**

Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
4. Apakah partisipasi masyarakat secara berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
4. Untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh terkait dalam mendukung tercapainya pengelolaan dana desa
2. Bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penyajian informasi untuk penelitian serupa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi objek penelitiannya, yaitu dibatasi hanya meneliti mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

BAB II

KAJIAN PERPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengelolaan Dana Desa

2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016: 39) adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan, keuangan dan tujuan desa, yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian desa. Arti pengelolaan dana desa adalah *soft skill* atau kemampuan aparat desa untuk mencapai suatu hasil tertentu dalam mengatur keuangan desa (Sutrawati, 2016:3). Sementara Solekhan (2014: 91) mendefinisikan pengelolaan dana desa adalah sebuah proses yang jelas dari aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk menentukan dan menetapkan tujuan desa.

Pengelolaan dana desa adalah serangkaian aktivitas-aktivitas keuangan desa, koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan, di Desa serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu keputusan yang efektif dan efisien (Sikula, 2015:82). Selanjutnya, definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Wijaya (2018:78) bahwa pengelolaan dana desa adalah suatu rangkaian aktivitas keuangan desa (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan akurat.

2.1.1.2 Manfaat Pengelolaan Dana Desa

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016: 202), Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Solekhan (2014:191) juga mengatakan bahwa secara hukum pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dengan tujuan bagi masyarakat desa serta terkendali. Kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa sangat terbuka, bagi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dicatat dan diadministrasikan dengan baik.

Pengelolaan dana desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah (Solekhan, 2014:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan peng anggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

2.1.1.3 Faktor-faktor Pengelolaan dana desa

Penggunaan ADD menurut Rahman (2016:9), ada 2 faktor dalam pengelolaan dana desa yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa yaitu :

1. Faktor pendukung
Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD salah satunya adalah partisipasi masyarakat
2. Faktor penghambat
Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD yaitu rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMP. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan ADD pada tahap perencanaan. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun bentuk fisik seperti perbaikan jalan, irigasi dan lain-lain

2.1.1.4 Indikator Pengelolaan dana desa

Pengelolaan aparatur desa suatu untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Keikutsertaan atau keterlibatan perangkat desa merupakan indikator penting dalam mengukur dalam peneglolaan dana desa (Solekhan, 2014:191). Keterampilan atau kemampuan yang diperlukan apartur desa yang ditunjukkan oleh kemampuan dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan. Kusnandar (2014:53) juga menjelaskan beberapa indikator pengelolaan dana desa yakni:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

(Setyadi, 2019:107)

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Transparansi yang berasal dari kata *transparency* adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara (Fitri, 2019:129).

Transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya merupakan suatu nilai dalam sistem pemerintahan yang baik atau sekarang ini yang lebih dikenal dengan *good governance*. Transparansi tersebut berupa penjaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan public (Medina, 2012:220). Transparansi merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi, termasuk prosedur, dan keputusan yang diambil oleh organisasi dalam pelaksanaan urusan publik atau kegiatannya (Fitri, 2019:173).

2.1.2.2 Manfaat Transparansi

Transparansi mengisyaratkan bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Medina (2012:94) menyebutkan beberapa keuntungan dari adanya transparansi:

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi dalam satabilitas fiskal dan makroekonomi sehingga bila ada penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol yang akan lebih baik jika pihak-pihak tersebut memiliki informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penerimaan/pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan lebih berlaku bertanggung jawab apabila keputusan yang akan diambil dilakukan secara terbuka/transparan untuk publik sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat membangun hubungan sosial yang lebih erat

Sehingga dapat dikatakan manfaat transparansi adalah melaksanakan fungsi kontrol yang akan lebih baik jika pihak-pihak tersebut memiliki informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penerimaan/pengeluaran pemerintah.

2.1.2.3 Ruang lingkup Transparansi

Transparansi berarti terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Septiarini, 2011:20). Menurut Tuannakotta (2014:96) professional transparansi dibagi menjadi lima kategori yaitu :

1. Independensi, yaitu sikap bebas dari pengaruh pihak lain, tidak tergantung dari pihak lain dan jujur dalam mempertimbangkan fakta serta adanya pertimbangan yang objective dalam merumuskan dan mengungkapkan pendapatnya
2. Kemampuan profesional, yaitu auditor internal harus memiliki tingkat kemampuan teknis yang tinggi agar dapat mempertanggung jawabkan
3. Ruang lingkup pekerjaan, yaitu pengujian dan evaluasi terhadap kecakupan serta efektifitas sistem partisipasi masyarakat internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, yaitu merupakan pedoman tentang struktur audit secara keseluruhan
5. Manajemen bagian transparansi, yaitu penanggung jawab atas seluruh tugas pemeriksaan transparansi.

Apabila semua indikator tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka peran transparansi dapat berjalan dengan efektif.

Tugiman (2014:201) mengemukakan ruang lingkup internal audit adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis keefektifan (Reliabilitas & Integrasi) informasi finansial dan operasional serta alat yang dipakai untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelompokkan, dan melaporkan informasi tersebut.
2. Melakukan pengamatan terhadap sistem yang ada dalam rangka memastikan adanya kesesuaian antara kegiatan/aktivitas/program yang dijalankan organisasi dengan kebijakan, peraturan, prosedur, hukum, rencana yang berdampak signifikan pada kegiatan organisasi.
3. Mengamati berbagai metode yang dipakai dalam menjaga aset/harta perusahaan. Apabila dibutuhkan maka akan melakukan verifikasi terhadap harta-harta tersebut.
4. Memberi penilaian terhadap efektifitas dan keekonomisan dalam pemakaian sumber daya.
5. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan operasional atau program organisasi/perusahaan apakah hasil yang diperoleh konsisten dan sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.2.4 Indikator Transparansi

Menurut Tugiman (2014:201) ada 5 indikator dalam transparansi, yaitu :

1. Pencatatan kas masuk maupun kas keluar
2. Laporan realisasi dan laporan yang dapat diakses oleh masyarakat
3. Laporan pertanggungjawaban kepada Walikota/Bupati

Sedangkan menurut Tuannakotta (2014:25) auditor hendaknya memperhatikan beberapa indikator dalam transparansinya berkaitan dengan risiko kecurangan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengenali kemungkinan kecurangan terkait dengan kegiatan/ substansi masalah/hal yang akan diaudit.
2. Menetapkan partisipasi masyarakat yang seharusnya ada, dalam rangka memastikan bahwa risiko kecurangan di atas tidak akan terjadi.
3. Mengidentifikasi apakah partisipasi masyarakat yang seharusnya ada tersebut benar-benar diterapkan atau tidak diterapkan oleh perusahaan.
4. Menetapkan tingkat kemungkinan terjadinya (*likelihood*) serta dampak (*consequences*) kecurangan tersebut, untuk menetapkan ranking risikonya.
5. Memilih risiko kecurangan yang akan di alami dalam kegiatan audit.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan/atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Mahmudi, 2016:65).

Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan dari sumber daya yang telah diberikan kepada seseorang serta pelaksanaan yang telah dikerjakan sebagai bentuk kebijakan yang dipercayakan kepada suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan oleh pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan dalam periode tertentu (Tugiman, 2014:99).

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN). Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Indrawati,2017). Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh *stakeholders* dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3.2 Manfaat Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Menurut Muindro (2013:99) adapun manfaat akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah :

1. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.
2. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
3. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
4. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, indikator yang harus diterapkan oleh kepala desa selaku pengelola dana desa adalah sebagai berikut (Tugiman, 2014:89):

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati
2. Laporan semester pertama
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
4. Laporan semester akhir tahun

2.1.4 Partisipasi masyarakat

2.1.4.1 Pengertian Partisipasi masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa inggris, yaitu *participation* yang berarti peran serta. Secara istilah, partisipasi adalah bentuk peran serta dan/atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara pro aktif. Sedangkan partisipasi menurut UNDP adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Rahman, 2016:8).

Wijaya (2018:94) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek/program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. Partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses dan tahapan pengambilan keputusan pemerintah/politik/negara. (Solekhan, 2014:71).

2.1.4.2 Tujuan Partisipasi masyarakat

Salah satu tujuan tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat ini adalah dalam hal pengambilan keputusan. Partisipasi dimaksudkan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat (Solekhan, 2014:206). Masyarakat dalam hal ini diikutsertakan untuk mengikuti dan

merumuskan segala sesuatu untuk mengembangkan desa. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 201). Beberapa manfaat dari adanya penerapan partisipasi ini adalah sebagai berikut (Wijaya, 2018:93):

- a. Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan, dan alokasi anggaran.
- b. Pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam tata pemerintahan dapat menjadi sumber adanya pendekatan-pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif.
- c. Keterlibatan kelompok marginal yang aktif berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.
- d. Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi adanya konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif

2.1.4.3 Indikator Partisipasi masyarakat

Partisipasi dapat dikatakan ketertiban seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Ketertiban dapat berupa ketertiban mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan (Sikula, 2015:65). keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok merupakan salah satu indikator dalam partisipasi masyarakat untuk pengelolaan desa yang mendorong kesuksesan desa setempat. Berdasarkan pengertian dan juga unsur partisipasi masyarakat, maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi (Sikula, 2015: 66):

- a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
- c. Adanya pengawasan dari masyarakat.

- d. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Rahmadani (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Kalitidu.

Fitri (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan keuangan Desa Suka Makmur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap Pengelolaan keuangan Desa.

Redi (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintahan di kabupaten Dairi. Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas dan Transparansi memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan baik parsial maupun simultan pada pemerintahan di kabupaten Dairi.

Andriani (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Larasati (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Bayuwangi. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi

aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Bayuwangi. Penjelasan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul / Nama	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Rahmadani (2021)	Regresi linier bergnada	akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Kalitidu	Memiliki variabel independen dan dependen yang sama	Memiliki populasi dan referensi yang berbeda
2.	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan keuangan Desa Suka Makmur. Fitri (2019)	Regresi linier bergnada	Transparansi dan Akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap Pengelolaan keuangan Desa	Memiliki variabel independen dan dependen yang sama	Memiliki populasi dan referensi yang berbeda
3.	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintahan di kabupaten Dairi. Redi (2019)	Regresi linier bergnada	Akuntabilitas dan Transparansi memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan baik parsial maupun simultan pada pemerintahan di kabupaten Dairi	Memiliki variabel independen dan dependen yang sama	Memiliki populasi dan referensi yang berbeda

4.	Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Andriani (2018)	Regresi linier bergnada	Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa	Memiliki variabel independen dan dependen yang sama	Memiliki populasi dan referensi yang berbeda
5.	engaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Bayuwangi. Larasati (2018)	Regresi linier bergnada	Kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Bayuwangi.	Memiliki variabel independen dan dependen yang sama	Memiliki populasi dan referensi yang berbeda

Sumber : Data diolah, (2022)

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Transparansi adalah keterbukaan atau tidak merahasiakan pengelolaan keuangan dari masyarakat. Dengan adanya transparansi diharapkan dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa. Dari penelitian Redi (2019) mengatakan bahwa transparansi sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya, diantara prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa). Pada

penelitian Septriani (2011) mengatakan bahwa desa Sumberejo dan Desa Kandung telah melaksanakan sosiaalisasi terkait keuangan desa kepada masyarakat.

2.3.2 Hubungan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

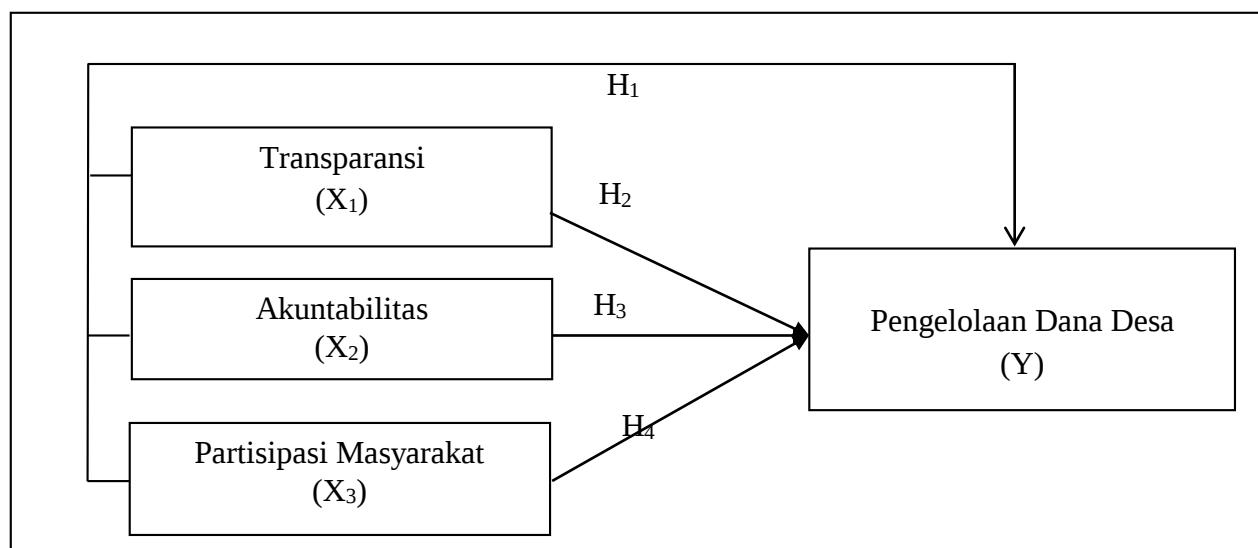
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggungjawab yang harus atau perlu dilakukan oleh pemerintah desa yang menjadi pelaku pengelola keuangan terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam penelitian Redi (2019) mengatakan bahwa pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Prinsip akuntabilitas perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Jadi, apabila semakin baik akuntabilitas maka akan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

2.3.3 Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan (Andriani, 2018). Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Menurut penelitian Septriani (2011), apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam

sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Dari kerangka pemikiran yang ditulis telah tergambar prosedur dan apa yang akan dikaji didalam penelitian. Adapun skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara pada penelitian, didalam penelitian ini yang menjadi hipotesis adalah:

Ha₁: Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Ha₂: Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Ha₃: Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Ha₄: Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2017: 152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi enam elemen yaitu:

3.1.1 Tujuan studi

Tujuan studi ini adalah pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

3.1.2 Jenis investigasi

Penelitian ini bersifat kausalitas, yaitu tipe penelitian yang menyatakan ada pengaruh antara variabel independen yaitu pengaruh antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

3.1.3 Horizon waktu

Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah *one shot*, yaitu horizon waktu yang mengumpulkan data penelitian hanya dalam sekali kumpul.

3.1.4 Unit analisis

Unit analisis merujuk kepada kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner yang dibagikan kepada pegawai secara individu.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis, yaitu objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya (Arikunto, 2013). Populasi penelitian ini adalah seluruh Desa yang ada di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 9 Desa, dengan jumlah yaitu 36 sampel yaitu Kepala Desa, Sekretaris Bendahara Desa serta Tuha peut Gampong. Seperti terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Populasi	Kepala Desa	Bendahara Desa	Tuha Peut
1	Batoh	1	1	2
2	Blang Cut	1	1	2
3	Cot Masjid	1	1	2
4	Lamdom	1	1	2
5	Lampaloh	1	1	2
6	Lamseupeung	1	1	2
7	Lueng Bata	1	1	2
8	Panteriek	1	1	2
9	Sukadamai	1	1	2
Total		9	9	18

Sumber : BPS, 2022

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengukuran berupa kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan serentetan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna (Arikunto, 2013:127).

Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari penyebaran pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada seluruh responden yaitu 35 orang. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2013:127). Kuesioner terdiri dari dua variabel dan masing-masing variabel memuat sejumlah item pertanyaan. Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu pertanyaan yang dibuat berbentuk pilihan yang telah disediakan. Kuesioner tersebut selanjutnya disebarkan kepada seluruh responden.

3.4 Skala Pengukuran

Pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Interval yaitu skala yang tidak hanya mengelompokkan individu tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga mengukur besaran (*magnitude*) perbedaan preferensi antar individu. Dimana jawaban masing-masing responden akan diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) poin (Sekaran 2017:129). Skala pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

3.5 Definisi Dan Operasionalisasi Variabel

Definisi dan operasionalisasi variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas. Serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala interval yaitu skala yang tidak hanya mengelompokkan individu menurut kategori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga mengukur besaran (*magnitude*) perbedaan preferensi antar individu (Sekaran 2017:117). Definisi dan operasional variabel dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Variabel : Dependen				
Pengelolaan dana desa (Y)	Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan, keuangan dan tujuan desa, yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian desa	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban (Setyadi, 2019:107)	Likert	1 – 4

	(Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 39)			
Variabel : Independen				
Transparansi (X ₁)	Prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara (Fitri, 2019)	1. Pencatatan kas masuk maupun kas keluar 2. Laporan ralisasi dan laporan yang dapat diakses oleh masyarakat 3. Laporan pertanggungjawaban kepada Walikota/Bupati (Tugiman, 2014: 201)	Likert	1 – 3
Akuntabilitas (X ₂)	Mempertanggungjawabkan pengelolaan dari sumber daya yang telah diberikan kepada seseorang serta pelaksanaan yang telah dikerjakan sebagai bentuk kebijakan yang dipercayakan kepada suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tugiman, 2014:99).	1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati 2. Laporan semester pertama 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 4. Laporan semester akhir tahun (Tugiman, 2014:89)	Likert	1 – 4
Partisipasi masyarakat (X ₃)	keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek/program yang dikerjakan oleh masyarakat local (Wijaya, 2018)	1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa. 2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. 3. Adanya	Likert	1 – 4

		pengawasan dari masyarakat. 4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa (Sikula, 2015: 66)		
--	--	---	--	--

3.6 Teknik Analisa Data

Peralatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Transparansi anggaran, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono 2019:204) :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan dana desa

α = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X_1 = Transparansi

X_2 = Akuntabilitas

X_3 = Partisipasi masyarakat

e = Standar Error

3.7 Pengujian Data

Sebelum data diolah lebih lanjut, harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Karena kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari pengguna instrumen.

3.7.1 Uji Validitas

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner dalam penelitian ini. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *Uji Person Product Movement Coeficient of Corelation* dengan bantuan SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*). Apabila $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$, maka item pertanyaan dinyatakan valid karena mempunyai koefisien korelasi diatas nilai kritis korelasi *product moment* yang memiliki tingkat signifikansi dibawah 5% (Sugiyono 2019:205).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas yaitu untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan pada uji reliabilitas adalah metode *Cronbach Alpha* (α) yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner. Untuk mengukur reliabilitas digunakan *coeffisien cronbath alpha* dengan koefisien alphanya lebih besar dari 0,60 (Sekaran 2017:182).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan hasil yang sah (tidak bias) maka sebelum melakukan pengujian hipotesis atau analisis regresi maka akan terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yaitu meliputi pengujian :

a Uji Normalitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut (Arikunto, 2013:127) jika distribusi data adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis normal. Dasar untuk pengambilan keputusan yaitu : Jika data menyebar diantara garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dan jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model asumsi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, terjadi pengaruh yang signifikan antar prediktor dengan nilai residualnya. Jika berpengaruh signifikan maka telah terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan dalam mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas ialah dengan melakukan uji gletser. Jika nilai *sig.* pada tabel koefisien hasil regresi masing-masing variabel independen dengan residualnya signifikan (*sig.* < 0.10), maka hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi

heteroskedastisitas. Jika tidak ($\text{sig.} > 0.10$), maka hal ini mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

c Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah didalam model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Metode yang digunakan untuk menguji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas dari nilai *tolerance* adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Jika nilai *tolerance* $< 0,01$ atau $\text{VIF} > 10$, maka telah terjadi multikolinearitas.

3.8 Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengukuran variabel dalam penelitian ini maka dilakukan pengujian untuk setiap hipotesis. Untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan, maka dilakukan uji-t untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu membandingkan nilai t_{tabel} dengan t_{hitung} dengan tingkat signifikan 5%.

3.5.1 Uji Secara Simultan

$H_{01} : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, maka Transparansi anggaran, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

$H_{a1} : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ ($\beta_i \neq 0$), maka Transparansi anggaran, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

3.5.2 Uji Secara Parsial

$H_{02} : \beta_1 = 0$, Transparansi anggaran tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

$H_{a2} : \beta_1 \neq 0$, Transparansi anggaran berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

$H_{03} : \beta_2 = 0$, Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

$H_{a3} : \beta_2 \neq 0$, Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

$H_{04} : \beta_3 = 0$, Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

$H_{a4} : \beta_3 \neq 0$, Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Lueng Bata

Kecamatan Lueng Bata merupakan pemekaran dari Kecamatan Lueng bata pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000. Nama kecamatan ini diambil dari nama Teuku Nyak Radja Imum Lueng Bata yang dikenal dengan Tgk. Imum Lueng Bata, salah seorang tokoh ulama dan pejuang Aceh. Ia memimpin Kemukiman Lueng Bata yang kala itu berstatus daerah bibeuh (bebas). Walaupun Lueng Bata berkategori Mukim dan dipimpin Uleebalang Teuku Raja, wilayah ini diperintah langsung oleh Sultan. Biarpun berbeda dengan Sagi XXV, XXVI dan XXII Mukim, kedudukan pimpinannya setara dengan Panglima tiga Sagi tersebut. Tgk Imum Lueng Bata dikabarkan meninggal dalam pengejaran Belanda, namun lokasinya tidak diketahui dengan pasti sampai saat ini. Secara administrasi wilayah Kecamatan ini terdiri atas 1 Mukim, yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) gampong. Gampong-gampong tersebut terbagi dalam 30 Dusun. Ke sembilan gampong dalam Kec. Lueng Bata adalah sebagai berikut :

1. Gampong Batoh
2. Gampong Blang Cut
3. Gampong Cot Mesjid
4. Gampong Lamdom
5. Gampong Lam Paloh
6. Gampong Lamseupeung

7. Gampong Lueng Bata
8. Gampong Panteriek
9. Gampong Sukadamai

VISI

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Melalui Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan

MISI

- Memberikan pelayanan administrasi pemerintahan yang profesional & terpadu dengan berlandaskan nilai-nilai Islami;
- Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan & pemberdayaan ekonomi melalui sosialisasi & pembinaan potensi di kecamatan;
- Meningkatkan kemampuan aparatur Kecamatan & aparatur Gampong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pengaruh asing yang bertentangan dengan Syariat Islam & adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

4.1.2 Karakteristik Responden

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yang disampaikan secara langsung oleh peneliti kepada para responden dalam hal ini yaitu Pegawai Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

yang berjumlah 36 orang. Peneliti mengambil kembali kuesioner untuk selanjutnya ditabulasikan dan diolah menggunakan program SPSS versi 22.0.

Dari jumlah kuesioner yang diedarkan kepada responden sebanyak 36 kuesioner, semuanya telah dikembalikan dengan tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100%, seluruh kuesioner yang disebarkan kembali semuanya, sehingga sampel akhir penelitian berjumlah 36 (n=36). Karakteristik responden seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1.	Jenis kelamin • Laki-laki • Perempuan	21 15	58% 42%
2.	Usia • ≤ 25 Tahun • > 25 – 35 Tahun • > 35 – 45 Tahun • > 45 Tahun	11 11 14	31% 31% 39%
3.	Pendidikan Terakhir • DIII • S1 • Pasca Sarjana • Lainnya	14 19 - 3	39% 53% - 8%
4.	Masa Kerja • < 5 tahun • 5 – 10 tahun • 10 – 15 tahun • > 15 tahun	14 7 13 2	39% 19% 36% 6%
Jumlah		36	100%

Berdasarkan Tabel 4.1, maka dapat dijelaskan bahwa jenis kelamin pria lebih mendominasi pegawai bidang anggaran pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 58% atau 21 orang berjenis kelamin laki-laki dan 42% atau 15 orang berjenis kelamin perempuan. 11 orang atau 31% berusia > 25 – 35 tahun dan berusia > 35 – 45 tahun, 14 orang atau 39% berumur lebih dari 45 tahun. Ditinjau dari pendidikan terakhir responden, diketahui bahwa dari seluruh responden penelitian tersebut sebanyak 14 orang berpendidikan DI/DII/DIII (39%), Sarjana berjumlah 19 orang (53%), dan dengan pendidikan lainnya berjumlah 3 orang (8%).

Dan jika dilihat dari masa kerjanya, 14 orang atau 39% dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, 7 orang atau 19% dengan masa kerja 5 - 10 tahun, 13 orang atau 36% dengan masa kerja 10 – 15 tahun dan 2 orang atau 6% dengan masa kerja lebih dari 15 tahun.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Transparansi

Variabel transparansi dalam penelitian ini memiliki 3 indikator yang telah dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang akan di jawab oleh responden, berikut pernyataan seperti yang terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Transparansi

N O	Variabel	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	2	3										4
1	Kantor desa pada kecamatan lueng bataselalu melakukan pencatatan kas masuk maupun kas keluar	0	0	0	0	0	0	17	47.2	19	52.8	4.528
2	Kantor desa pada kecamatan lueng bata selalu membuat Lapoan realisasi dan laporan yang dapat diakses oleh masyarakat	0	0	0	0	0	0	16	44.4	20	55.6	4,556
3	Kantor desa pada kecamatan lueng bata selalu membuat Laporan pertanggungjawaban kepada Bupati	0	0	0	0	0	0	19	52.8	17	47.2	4,472
Rerata												4.528

Berdasarkan Tabel 4.2, maka dapat dijelaskan bahwa variabel transparansi diperoleh nilai rerata sebesar 4,528 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju jika Kantor desa pada kecamatan lueng bata selalu membuat Lapoan realisasi dan laporan yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan demikian transparansi antara pengelola dana desa dan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

4.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah satu satu variabel yang dapat memepengaruhi pengelolaan dana desa, variabel akuntabilitas memiliki 4 indikator yang telah dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang akan dijawab oleh responden, seperti yang terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Akuntabilitas

N O	Variabel	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	2	3										4
1	Kantor desa pada kecamatan lueng bata setiap kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan	0	0	0	0	0	0	19	52.8	17	47.2	4,472
2	Kantor desa pada kecamatan lueng bata selalu menyampaikan Laporan semester pertama	0	0	0	0	0	0	17	47.2	19	52.8	4.528
3	Kantor desa pada kecamatan lueng bata selalu membuat Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa	0	0	0	0	0	0	13	36.1	23	63.9	4.639
4	Kantor desa pada kecamatan lueng bata selalu mengerjakan Laporan semester akhir tahun	0	0	0	0	0	0	12	33.3	24	66.7	4.667
Rerata												4.576

Berdasarkan Tabel 4.5, maka dapat dijelaskan bahwa variabel partisipasi masyarakat diperoleh nilai rerata sebesar 4.366 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju jika mereka yakin bahwa mereka dapat ikut berperan dalam pengelolaan dana desa.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Pengujian Instrumen

a. Hasil Pengujian Validitas

Uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner dalam penelitian ini. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *Uji Person Product Movement Coeficient of Corelation* dengan bantuan SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*). Untuk penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 bahwa hasil pengujian nilai kritis untuk mengukur kedua variabel dalam penelitian ini adalah 0,344. Maka item pertanyaan dinyatakan valid karena mempunyai koefisien korelasi diatas nilai kritis korelasi *product moment*. Seperti terlihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas

No	Pernyataan	Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis 5% (df = N-3)	Keterangan
1	A1	X ₁	0,876	0,344	Valid
2	A2		0,876	0,344	Valid
3	A3		0,885	0,344	Valid
4	B1	X ₂	0,356	0,344	Valid
5	B2		0,441	0,344	Valid
6	B3		0,699	0,344	Valid
7	B4		0,368	0,344	Valid
8	C1	X ₃	0,376	0,344	Valid
9	C2		0,859	0,344	Valid
10	C3		0,859	0,344	Valid
11	C4		0,899	0,344	Valid
12	D1	Y	0,480	0,344	Valid
13	D2		0,702	0,344	Valid
14	D3		0,638	0,344	Valid
15	D4		0,717	0,344	Valid

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil pengujian validitas, kuesioner yang berisi dari 4 variabel ini berisi 15 pernyataan yang telah diisi oleh 36 responden pada penelitian ini. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, maka nilai $r\text{-hitung} > \text{nilai } r\text{-tabel}$ dengan tingkat signifikansi dibawah 5%. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 36 responden, rumus dari r tabel adalah $df = N-2$ jadi $36-2 = 34$, sehingga $r \text{ tabel} = 0,344$ dan semua hasil dari kedua variabel mendapat nilai

koefesien korelasi lebih dari 0,344, sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid dan dapat dilakukan penelitian untuk uji selanjutnya yang lebih mendalam.

b. Hasil Pengujian Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas *cronbach alpha* yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner dalam penelitian ilmu sosial. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel. Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten juga dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS versi 23.0. seperti terlihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Alpha
Transparansi (X ₁)	3	0,649
Akuntabilitas (X ₂)	4	0,707
Partisipasi masyarakat (X ₃)	4	0,737
Pengelolaan dana desa (Y)	4	0,624

Berdasarkan Tabel 4.6, maka pengujian reliabilitas dengan *cronbach alpha* terhadap 15 pernyataan yang telah dinilai jawabannya, maka dapat dilihat bahwa alpha untuk variabel transparansi sebesar 0,649, variabel akuntabilitas sebesar 0,707,

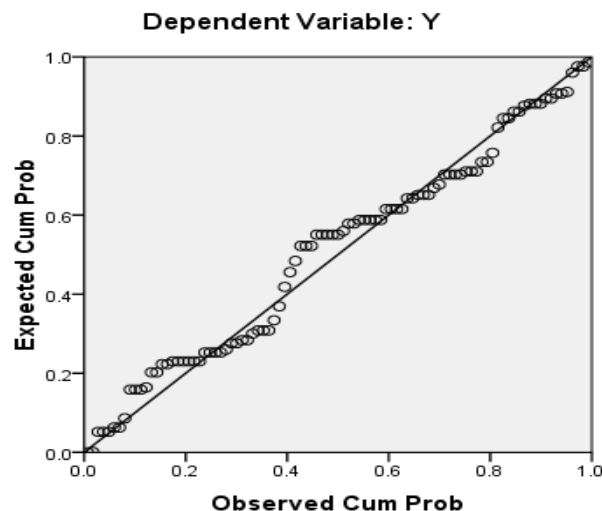
partisipasi masyarakat nilainya 0,737 dan pengelolaan dana desa memiliki nilai alpa 0,624. karena memiliki nilai $> 0,6$, mengacu kepada syarat suatu instrumen dikatakan reliabel memiliki $\alpha > 0,6$, maka kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

c. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas menggambarkan residul variabel yang terdistribusi normal akan terletak disekitar garis horizontal (tidak terpancar jauh dari garis diagonal). Berdasarkan uji normalitas gambar normal P-P Plot menunjukkan sebaran *standarrized residul* berada dalam kisaran garis diagonal. Seperti terlihat pada gambar berikut. Normal P-P Plot menunjukkan sebaran *standarrized residul* berada dalam kisaran garis diagonal. Seperti terlihat pada Gambar 4.1.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

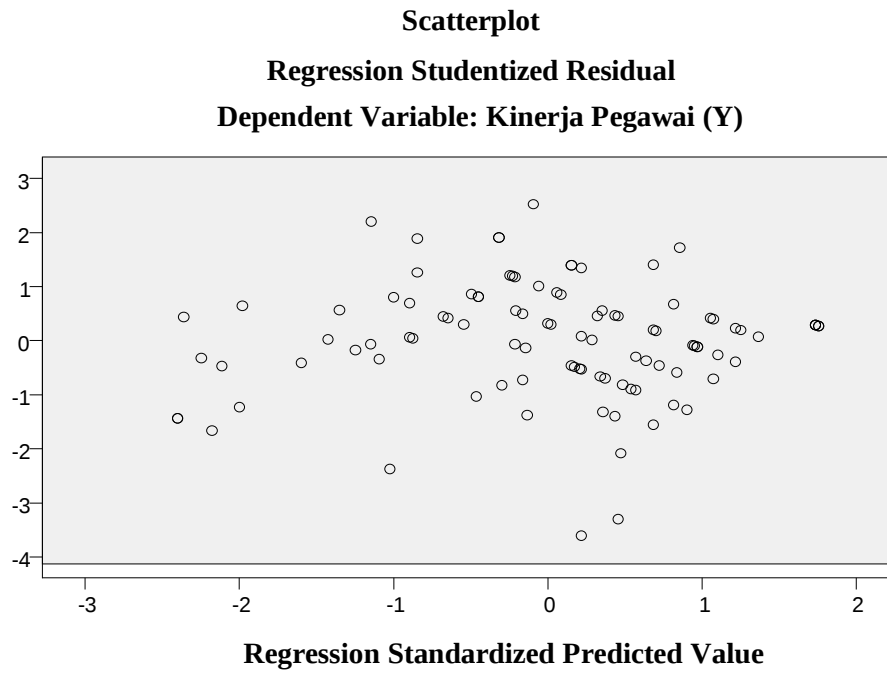


Gambar 4.1. P.Plot

Berdasarkan gambar 4.1 uji normalitas untuk persamaan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan dana desa dapat dilihat pada histogram dan *normal probability plot* di atas dapat dilihat bahwa histogram distribusi data dalam bentuk lonceng (*bell shaped*) dan garis *normal probability plot* yang menggambarkan sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya. Dengan demikian maka data yang diolah mengikuti atau mendekati distribusi normal.

2. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka homokedastisitas, dan jika *varians* berbeda disebut heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan mengamati pola yang terdapat pada Scatterplot, dimana hasilnya dapat dilihat pada Gambar IV.2 berikut :



Gambar IV.2
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar IV.2 uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.2 Regresi Linier Berganda

Untuk melihat pengaruh sistem transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata, menggunakan regresi linier berganda. Seperti pada Tabel 4.7.

Tabel 4.8

Coefficients^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	
	B	Std. Error	Beta			Partial	Part
1 (Constant)	3.314	4.810		.689	.496		
X1	.448	.156	.354	2.881	.007	.454	.341
X2	.322	.254	.011	3.085	.003	.015	.010
X3	.796	.152	.673	5.245	.000	.680	.621

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS seperti terlihat pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi untuk pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Persamaannya dapat kita lihat sebagai berikut:

$$Y = 3.314 + 0,448X_1 + 0.322X_2 + 0.796X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 3,314 dapat diartikan bahwa tanpa adanya transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa telah ada nilai sebesar 3.314.

4.3.3 Koefisien Determinasi

Hasil pengolahan data juga menunjukkan hubungan antara variabel predictor dengan kriteriumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi/koefisien determinasi yang dihasilkan oleh sebuah persamaan regresi yang dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.9**Model Summary**

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	
1	.743 ^a	.552	.510	1.25004	.552	13.148	3	32	2.063

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Koefesien Determinasi (R^2) sebesar 0,552 artinya sebesar 55,2 % perubahan-perubahan dalam variabel terikat (partisipasi masyarakat) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

4.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk keempat rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

$H_1 = \beta_1 = 0,448$, $\beta_2 = 0,322$ dan $\beta_3 = 0,796$, maka dapat diartikan $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ ($\beta_i \neq 0$) dan nilai prob F > nilai kritis. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti (2019) dengan hasil penelitiannya yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap dalam pengelolaan dana Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

1. Variabel Akuntabilitas (X_1)

$H_2 = \beta_1 = 0,448$, maka dapat diartikan $\beta_1 \neq 0$ dan nilai prob $t <$ nilai kritis.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

3. Variabel Pengawasan (X_2)

$H_3 = \beta_2 = 0,322$, maka dapat diartikan $\beta_2 \neq 0$ dan nilai prob $t <$ nilai kritis.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

4. Variabel Transparansi (X_3)

$H_4 = \beta_3 = 0,796$, maka dapat diartikan $\beta_3 \neq 0$ dan nilai prob $t <$ nilai kritis.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara parsial memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2019), Redi (2019) dan Istikomah (2020) dengan hasil penelitian transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap dalam pengelolaan dana Desa .

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pembahasan Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat Terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa Konstanta (α) sebesar 3.314 yang berarti jika variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dianggap konstan, maka besarnya pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sebesar 33,14%.

Hasil penelitian dalam hal keterlibatan masyarakat dimulai proses pengelolaan baik perencanaan hingga pelaporan, keterlibatan masyarakat diharapkan akan memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa, keterlibatan masyarakat juga akan membuat masyarakat aktif dalam kegiatan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, pemerintah juga telah transparan terhadap informasi keuangan meskipun masih banyak yang harus dibenahi dan ditingkatkan. Pemerintah juga telah melibatkan masyarakat

dalam pengambilan keputusan meskipun masih sangat sedikit kontribusi dari masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2013) yang meneliti mengenai strategi pengelolaan dana desa pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriteria pertama adalah faktor partisipasi masyarakat, kedua kriteria faktor transparansi anggaran, dan ketiga kriteria faktor Akuntabilitas (SDM). Alternatif prioritas program yakni diadakan sosialisasi mengenai mekanisme pencairan anggaran.

4.4.2 Pembahasan Transparansi terhadap Pengelolaan dana desa Pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukan nilai Koefesien regresi variabel transparansi sebesar 0,448, yang berarti bahwa setiap meningkatnya perencanaan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sebesar 44,8%.

Transaparansi sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya, diantara prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer,

pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa).

4.4.3 Pembahasan Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Serapan Anggaran Pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata. Hal ini dibuktikan dengan hasil Koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0,322, yang berarti bahwa setiap meningkatnya pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar 32,2%.

Variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap serapan anggaran pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata, dengan adanya akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, sehingga pengelolaan dana desa pun akan baik. Hal ini terjadi karena prinsip akuntabilitas perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat. sehingga apabila semakin baik akuntabilitas maka akan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

4.4.4 Pembahasan Pengaruh Partisipasi masyarakat Terhadap Serapan Anggaran Pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata. Hal ini dibuktikan dengan hasil Koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,796, yang berarti bahwa setiap meningkatnya pengelolaan dana desa pada

Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar 79,6%.

Variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka akan adanya pembaharuan sistem yang kurang baik, sehingga pengelolaan dana desa pun akan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
2. Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
3. Akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
4. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengenai responden, agar penelitian dapat dikatakan lebih representatif, maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya, kapasitas nya lebih luas tidak hanya pada Kantor Desa Kecamatan Lueng Bata.

2. Menambahkan variabel penelitian sehingga penelitian dapat lebih meyakinkan

DAFTAR PERPUSTAKAAN

- Rahman, Muh. Akil, Dkk.(2016). “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance”. *Jurnal Akuntansi Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Wida, P., & Rina, M. 2016. Analisis Pengaruh Pengalaman Keuangan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Perilaku Keuangan Keluarga Di Kecamatan Purwokerto Timur, *BENEFIT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 141-148
- Ardhana, YM Kusuma 2012. *PHP Mnyelesaikan Website 30 Juta*. Jakarta: Jasakom
- Egi Primayoga. 2019. Ladang Basah korupsi Dana Desa. Melalui <https://beritagar.Id/article/berita/ladang-basah-korupsi-dana-desa>. Di akses pada 02-03- 2019.
- Fitri. 2019. PengaruhTransparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*. Vol. 2 No. 1.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. (2011). Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Medina, F. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Universitas Indonesia*
- Muindro Renyowijoyo. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Sikula (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Erlangga
- Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara. Press, Malang
- Sutrawati, Kadek. (2016). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas. Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pudaria Jaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol.2 No.1.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2014). Audit Berbasi ISA (International Standards on Auditing). Salemba Empat, Jakarta.
- Tugiman, Hiro. 2014. *Pandangan Baru Internal Auditing*. Kanisius:Yogyakarta.
- Wijaya. David. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Yuliansyah, dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta; Salemba Empat.

Pengelolaan.dana.desa.<https://djp.kemenkeu.go.id/>

Transaparansi.dana,desa. bjn.desa.id/artikel/2021/4/6/transparansi-desa

KUESIONER

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)**

I. Identitas Responden

1. jenis Kelamin:

☐

laki-laki

☐

Perempuan

2. Usia:

☐

25 – 30 tahun

☐

36 - 40 tahun

☐

31 – 35 tahun

☐

> 40 tahun

3. Pendidikan terakhir :

☐

DIII

☐

Pasca Sarjana

☐

S1

☐

lainnya

4. Masa Kerja

☐

1 – 5 Tahun

☐

11 - 15 tahun

☐

6 - 10 Tahun

☐

> 15 tahun

Alternatif Pilihan :

- (1) Sangat Tidak Setuju (STS)
- (2) Tidak Setuju (TS)
- (3) Kurang Setuju (KS)
- (4) Setuju (S)
- (5) Sangat Setuju (SS)

A. Pengelolaan Dana Desa (Y)

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Kantor desa memahami dan mengetahui apa perencanaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan					
2	desa menyelesaikan sendiri semua tugas yang diberikan walaupun masalah dana desa ini adalah permasalahan yang baru					
3	Desa memiliki alur dan strategi sendiri untuk pengelolaan dana desa mereka					
4	Desa selalu membuat Pelaporan dan pertanggungjawaban					

B. Transparan

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Kantor desa pada kecamatan lueng bataselalu melakukan pencatatan kas masuk maupun kas keluar					
2	Kantor desa pada kecamatan lueng bataselalu membuat Lapoan realisasi dan laporan yang dapat diakses oleh masyarakat					
3	Kantor desa pada kecamatan lueng bata selalu membuat Laporan pertanggungjawaban kepada Bupati					

C. Akuntabilitas

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Kantor desa pada kecamatan lueng bata setiap kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan					
2	Kantor desa pada kecamatan lueng bata selalu menyampaikan Laporan semester pertama					
3	Kantor desa pada kecamatan lueng bata selalu membuat Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa					
4	Kantor desa pada kecamatan lueng bata selalu mengerjakan Laporan semester akhir tahun					

D. Partisipasi Masyarakat

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Adanya Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa					
2	Adanya Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa					
3	Adanya pengawasan dari masyarakat					
4	Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa					

Frequency Table

a1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	17	47.2	47.2	47.2
	5.0	19	52.8	52.8	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

a2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	16	44.4	44.4	44.4
	5.0	20	55.6	55.6	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

a3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	19	52.8	52.8	52.8
	5.0	17	47.2	47.2	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

b1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	19	52.8	52.8	52.8
	5.0	17	47.2	47.2	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

b2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	17	47.2	47.2	47.2
	5.0	19	52.8	52.8	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

b3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	13	36.1	36.1	36.1
	5.0	23	63.9	63.9	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

b4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	12	33.3	33.3	33.3
	5.0	24	66.7	66.7	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

c1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	19	52.8	52.8	52.8
	5.0	17	47.2	47.2	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

c2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	16	44.4	44.4	44.4
	5.0	20	55.6	55.6	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

c3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	16	44.4	44.4	44.4
	5.0	20	55.6	55.6	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

c4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	19	52.8	52.8	52.8
	5.0	17	47.2	47.2	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

d1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	16	44.4	44.4	44.4
	5.0	20	55.6	55.6	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

d2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	16	44.4	44.4	44.4
	5.0	20	55.6	55.6	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

d3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	16	44.4	44.4	44.4
	5.0	20	55.6	55.6	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

d4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	19	52.8	52.8	52.8
	5.0	17	47.2	47.2	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Correlations

		Correlations				
		a1	a2	a3	a4	X1
a1	Pearson Correlation	1	.722**	.895**	-.174	.876**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.310	.000
	N	36	36	36	36	36
a2	Pearson Correlation	.722**	1	.846**	-.125	.876**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.468	.000
	N	36	36	36	36	36
a3	Pearson Correlation	.895**	.846**	1	-.274	.885**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.106	.000
	N	36	36	36	36	36
X1	Pearson Correlation	.876**	.876**	.885**	.152	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.376	
	N	36	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations						
		b1	b2	b3	b4	X2
b1	Pearson Correlation	1	.226	-.100	-.511**	.356*
	Sig. (2-tailed)		.185	.563	.001	.033
	N	36	36	36	36	36
b2	Pearson Correlation	.226	1	-.132	-.315	.441**
	Sig. (2-tailed)	.185		.443	.062	.007
	N	36	36	36	36	36
b3	Pearson Correlation	-.100	-.132	1	.573**	.699**
	Sig. (2-tailed)	.563	.443		.000	.000
	N	36	36	36	36	36
b4	Pearson Correlation	-.511**	-.315	.573**	1	.368*
	Sig. (2-tailed)	.001	.062	.000		.027
	N	36	36	36	36	36
X2	Pearson Correlation	.356*	.441**	.699**	.368*	1
	Sig. (2-tailed)	.033	.007	.000	.027	
	N	36	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Correlations		c1	c2	c3	c4	X3
c1	Pearson Correlation	1	.062	.062	-.003	.376*
	Sig. (2-tailed)		.719	.719	.986	.024
	N	36	36	36	36	36
c2	Pearson Correlation	.062	1	.662**	.846**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.719		.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36
c3	Pearson Correlation	.062	.662**	1	.846**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.719	.000		.000	.000
	N	36	36	36	36	36
c4	Pearson Correlation	-.003	.846**	.846**	1	.899**
	Sig. (2-tailed)	.986	.000	.000		.000
	N	36	36	36	36	36
X3	Pearson Correlation	.376*	.859**	.859**	.899**	1
	Sig. (2-tailed)	.024	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36	36

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations						
		d1	d2	d3	d4	Y
d1	Pearson Correlation	1	.100	.100	.174	.480**
	Sig. (2-tailed)		.562	.562	.310	.003
	N	36	36	36	36	36
d2	Pearson Correlation	.100	1	.662**	.846**	.702**
	Sig. (2-tailed)	.562		.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36
d3	Pearson Correlation	.100	.662**	1	.846**	.638**
	Sig. (2-tailed)	.562	.000		.000	.000
	N	36	36	36	36	36
d4	Pearson Correlation	.174	.846**	.846**	1	.717**
	Sig. (2-tailed)	.310	.000	.000		.000
	N	36	36	36	36	36
Y	Pearson Correlation	.480**	.702**	.638**	.717**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Cronbach's Alpha	.649	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
a1	4.528	.5063	36
a2	4.556	.5040	36
a3	4.472	.5063	36

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Variance	N of Items
Item Means	4.528	4.472	4.556	.083	.002	3

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
18.111	1.987	1.4097	3

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha ^a	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items ^a	N of Items
.707	-.199	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
b1	4.472	.5063	36
b2	4.528	.5063	36
b3	4.639	.4871	36
b4	4.667	.4781	36

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Variance	N of Items
Item Means	4.576	4.472	4.667	.194	.008	4

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
18.306	.847	.9202	4

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha		
Based on		
Cronbach's Alpha	Standardized Items	N of Items
.737	.738	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
c1	4.472	.5063	36
c2	4.556	.5040	36
c3	4.556	.5040	36
c4	4.472	.5063	36

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Variance	N of Items
Item Means	4.514	4.472	4.556	.083	.002	4

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
18.056	2.283	1.5108	4

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.624	.624	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
d1	4.556	.5040	36
d2	4.556	.5040	36
d3	4.556	.5040	36
d4	4.472	.5063	36

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Variance	N of Items
Item Means	4.366	4.028	4.556	.528	.070	4

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
26.194	3.190	1.7860	4

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	26.1944	1.78597	36
X1	18.1111	1.40972	36
X2	18.3056	.92023	36
X3	18.0556	1.51081	36

Correlations

		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1.000	.309	.328	.652
	X1	.309	1.000	.215	-.070
	X2	.328	.215	1.000	.357
	X3	.652	-.070	.357	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.033	.025	.000
	X1	.033	.	.104	.342
	X2	.025	.104	.	.016
	X3	.000	.342	.016	.
N	Y	36	36	36	36
	X1	36	36	36	36
	X2	36	36	36	36
	X3	36	36	36	36

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson
					df1	df2	Sig. F Change	
1	.743 ^a	.552	.510	1.25004	3	32	.000	2.063

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61.635	3	20.545	13.148	.000 ^b
	Residual	50.003	32	1.563		
	Total	111.639	35			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	
		B	Std. Error	Beta			Partial	Part
1	(Constant)	3.314	4.810		.689	.496		
	X1	.448	.156	.354	2.881	.007	.454	.341
	X2	.322	.254	.011	.085	.933	.015	.010
	X3	.796	.152	.673	5.245	.000	.680	.621

a. Dependent Variable: Y

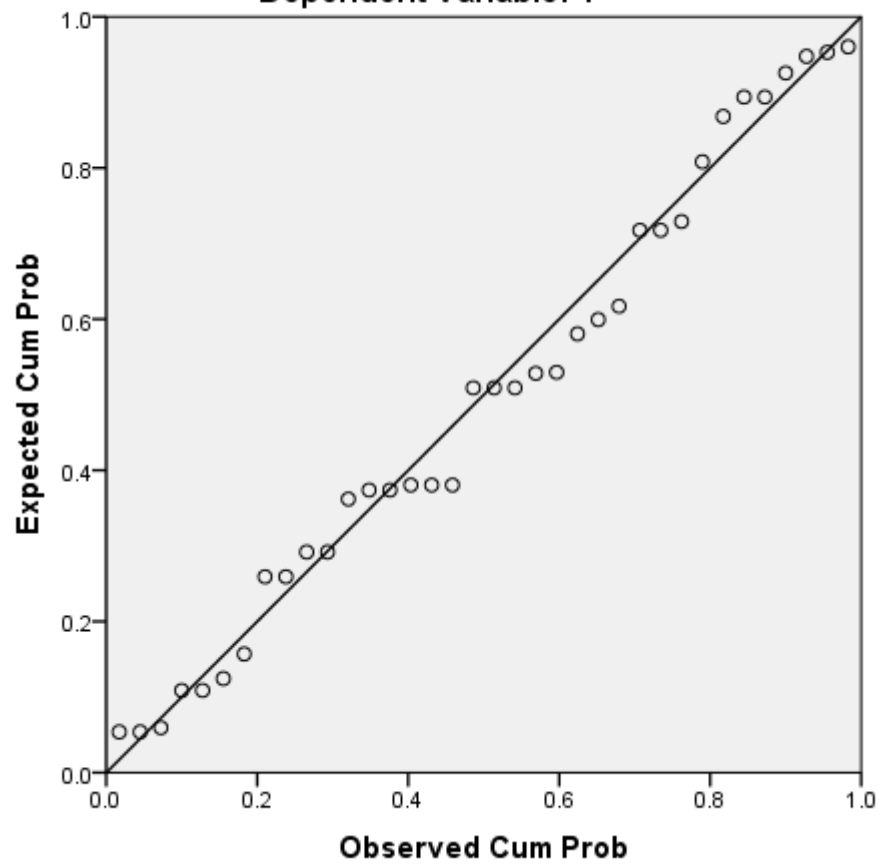
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	23.6278	28.6032	26.1944	1.32703	36
Std. Predicted Value	-1.934	1.815	.000	1.000	36
Standard Error of Predicted Value	.271	.626	.406	.096	36
Adjusted Predicted Value	23.5062	28.3872	26.1684	1.34801	36
Residual	-2.01164	2.19257	.00000	1.19527	36
Std. Residual	-1.609	1.754	.000	.956	36
Stud. Residual	-1.683	1.934	.010	1.012	36
Deleted Residual	-2.20118	2.79390	.02605	1.34123	36
Stud. Deleted Residual	-1.735	2.026	.013	1.034	36
Mahal. Distance	.670	7.808	2.917	1.891	36
Cook's Distance	.000	.313	.031	.056	36
Centered Leverage Value	.019	.223	.083	.054	36

a. Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y



Scatterplot

Dependent Variable: Y

